

FORPI PAKTA INTEGRITAS LAYANGKAN REKOMENDASI

Selain IMB, Desak Evaluasi Seluruh Dokumen Amdal

YOGYA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi akan menelusuri perizinan di masa kepemimpinan Haryadi Suyuti berkaitan dugaan suap. Sejalan dengan itu, Pemkot Yogya juga tengah mencermati dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Akan tetapi, selain IMB seluruh dokumen terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) turut didesak untuk dievaluasi.

Usulan tersebut disampaikan secara resmi oleh Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Yogya melalui rekomendasi kepada Penjabat (Pj) Walikota Yogya. "Sesuai ketugasan kami untuk mengawal pakta integritas, usai peristiwa hukum atas dugaan suap perizinan Royal Kedhaton, hari ini (kemarin) kami sampaikan rekomendasi ke Pj Walikota," tandas anggota Forpi Kota Yogya Baharudin, Senin (6/6).

Terdapat lima poin yang disampaikan dalam rekomendasi tersebut. Salah satunya, imbuhan Baharudin, ialah melakukan evaluasi secara tuntas terkait seluruh dokumen perizinan,

termasuk Amdal. Diakuinya, Amdal memiliki peran strategis dalam proses perizinan. Apalagi terhadap rencana usaha atau kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan.

Proses penerbitan Amdal pun tidak hanya melibatkan unsur pemerintah melainkan kalangan akademisi hingga masyarakat. Pengaruh positif maupun negatif dalam proses pembangunan juga dituangkan dalam dokumen tersebut. "Dokumen Amdal itu dibutuhkan sebagai pertimbangan mengambil kebijakan. Sehingga proses Amdal harus sesuai dengan kaidah. Makanya perlu ada evaluasi secara tuntas," imbuhnya.

Selain dokumen Amdal, analisis

dampak lalu lintas atau Amdal Lalin, jelas Baharudin, tidak bisa dikesampingkan. Terutama terhadap bangunan-bangunan komersial di wilayah Kota Yogya. Hal ini karena beban lalu lintas di Kota Yogya sudah sangat berat sehingga gedung komersial yang hendak dibangun perlu mempertimbangkan kajian lalu lintas. Pihak-pihak yang terkait penerbitan Amdal serta Amdal Lalin dituntut bekerja secara profesional.

Baharudin menjelaskan, jika dalam evaluasi ditemukan adanya pelanggaran yang sangat fatal maka IMB yang telah dikeluarkan dapat dicabut. "Seharusnya tidak ada keraguan untuk mencabut izin yang sebelumnya sudah diterbitkan ketika dalam evaluasi terbukti ada pelanggaran. Berarti kan ada dokumen yang tidak sesuai kaidah dan melanggar hukum," tegasnya.

Di samping itu, Forpi turut mendesak agar dilakukan kajian ulang terhadap aturan yang berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Peran, fungsi

dan wewenang Inspektorat Kota Yogya tentunya harus diperkuat. Pihaknya bahkan siap melakukan upaya bersama-sama dalam penegakan pakta integritas di lingkungan Pemkot Yogya. "Kami turut prihatin atas peristiwa hukum yang terjadi. Semoga peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Yogya," katanya.

Sebelumnya, Pj Walikota Yogya Sumadi SH MH, mengaku akan mencermati semua perizinan yang sudah diterbitkan selama era kepemimpinan Haryadi Suyuti. Pencermatan tersebut untuk menentukan apakah izin yang diterbitkan sudah sesuai ketentuan atau belum.

"Pada prinsipnya kami akan melihat, mencermati apa yang sudah dikeluarkan terhadap izin-izinya, apakah sudah sesuai ketentuan atau belum. Kalau ada hal-hal ya kita sesuaikan dengan ketentuan saja," terangnya. (Dhi)-d

AH MAKIN MANTAP JADI CAPRES Golkar DIY Yakin AH Tidak Kena Reshuffle



KR-Istimewa

Gandung Pardiman

Hartarto aman dari reshuffle kabinet.

"Kami semakin yakin perjalanan Pak Airlangga Hartarto makin mantap untuk menjadi calon presiden jika melihat perkembangan dari KIB. Meskipun Pak Airlangga menyatakan jangan terburu-buru ke arah itu (jadi capres) makin terlihat," ungkap Gandung Pardiman, Ketua DPD Golkar DIY dalam siaran pers yang diterima KR, Senin (6/6).

Gandung Pardiman menambahkan, adanya penandatanganan kesepakatan KIB yakni Partai Golkar, PAN dan PPP menunjukkan bahwa KIB benar-benar solid lahir batin demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

"Penandatanganan kesepakatan ini semakin menegaskan solidnya KIB karena memiliki visi misi yang sama," ujarnya.

Selain itu, Gandung Pardiman menyatakan bahwa jajaran Golkar DIY yakin Airlangga Hartarto aman dari reshuffle kabinet. Sebab kinerja Ketua Umum Partai Golkar tersebut sangat baik dan masih dibutuhkan Pemerintahan Presiden Jokowi.

"Jika melihat track record kinerja Pak Airlangga sebagai Menko, maka Golkar DIY yakin beliau aman dari reshuffle," tegas Gandung Pardiman yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar dari DIY.

Oleh karena itu, kata Gandung, seluruh kader Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk bekerja keras dan terjun langsung di tengah masyarakat mensosialisasikan Partai Golkar dan Airlangga Hartarto sebagai capres, agar elektabilitasnya terus naik.

"Kita sebagai kader Golkar harus bekerja keras agar elektabilitas Partai Golkar dan Airlangga seja-jar," pungkas Gandung. (Dev)-d

PEMKOT YOGYA GENAP BERUSIA 75 TAHUN

Pertahankan Prestasi, Momentum Antigratifikasi

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya pada Selasa (7/6) hari ini genap berusia 75 tahun. Di luar peristiwa hukum yang membelit salah seorang pejabat serta mantan kepala daerah, Pemkot Yogya telah mengukir beragam prestasi. Prestasi tersebut harus tetap dipertahankan sekaligus menjadi momentum antigratifikasi.

Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudiymoko, mengaku sebagai mitra kerja pemerintah mengukir unsur pemerintahan dalam mengelola pembangunan dan menggunakan anggaran daerah sudah mumpuni.

"Dalam arti sesuai dengan pelaksanaan penataan keuangan daerah. Namun demikian, jangan lagi ada aparat sipil ne-

gara (ASN) yang dibayangkan sesuatu hal ingin mendapatkan lebih," pesannya menyambut HUT ke-75 tahun Pemkot Yogya, Senin (6/6).

Jelang peringatan 75 tahun Pemkot Yogya, tepatnya pada Kamis (2/6) lalu, publik dikejutkan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah pemeriksaan, KPK akhirnya menetapkan empat tersangka atas dugaan suap perizinan Apartemen Royal Kedhaton. Masing-masing ialah mantan Walikota Yogya Haryadi Suyuti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nurwidhiarta, mantan ajudan eks Walikota Yogya Triyanto Budi Yuwono, serta Vice

President PT Summarecon Agung Oon Nusihono.

Danang pun berharap kemarin menjadi peristiwa terakhir serta terbangun kesadaran bersama agar bekerja secara profesional. Peristiwa itu bahkan harus menjadi tamparan keras bagi seluruh aparat.

"Ini yang harus menjadi kesadaran bersama. Selama ini Pemkot sudah cukup baik. Dari penilaian internal dan berbagai insansi eksternal pun sudah cukup baik. Intinya ASN jangan silau dengan gratifikasi. Makanya ini momentum antigratifikasi," tandasnya.

Tidak dapat dipungkiri, apapun yang sudah dilakukan oleh Haryadi Suyuti selama 15 tahun memimpin Kota Yogya, selaku pimpinan daerah su-

dah banyak menorehkan prestasi. Salah satunya torehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah selama 13 kali berturut-turut. "Tapi kalau dikatakan, kemarin itu jadi pengalaman yang sangat mahal yang dilakukan beliau. Bagi saya itu sesuatu yang sangat mahal peraturannya," urainya.

Oleh karena itu, terkait dengan rencana penelusuran oleh KPK terhadap seluk beluk perizinan di Kota Yogya, tidak perlu ditakuti. Terutama jika memang tidak pernah mela-

kukan kesalahan, harus mempertahankan profesionalitas dalam bekerja. Sebaliknya, jika ada yang pernah khilaf, jangan sampai hal itu terulang kembali serta menjadi bayang-bayang untuk semakin baik.

"Pesan saya untuk pejabat walikota, bertindak sebagaimana fungsinya sesuai amanah untuk memimpin jalannya pemerintahan sampai terpilih kepala daerah definitif. Jalankan dengan baik dan pertahankan prestasi yang sudah diraih," katanya. (Dhi)-d

SD Muhammadiyah Sapan Raih Nilai Rerata Tertinggi



KR-Istimewa

Siswa SD Muhammadiyah Sapan saat mengikuti ASPD

YOGYA (KR) - SD Muhammadiyah Sapan berhasil menjadi salah satu peraih nilai rerata tertinggi Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah Berbasis Komputer (ASPD BK) Tahun 2022 Kota Yogyakarta.

"Alhamdulillah, kerja keras seluruh warga sekolah mendapatkan hasil yang menggembirakan", ungkap Agung Rahmanto, Kepala SD Muhammadiyah Sapan, Senin (6/6).

Agung menjelaskan, hasil ini merupakan buah dari proses yang sangat panjang, bukan secara instan. Guru, orangtua, dan siswa bersinergi secara bersama-sama mempersiapkan segala sesuatunya. "Sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk mengantarkan peserta didik agar dapat diterima di sekolah lanjutan yang diinginkan," tandas Agung.

Menurut Agung, sedari awal sekolah sudah memetakan keinginan masing-masing siswa ten-

gata (ASN) yang dibayangkan sesuatu hal ingin mendapatkan lebih," pesannya menyambut HUT ke-75 tahun Pemkot Yogya, Senin (6/6).

Jelang peringatan 75 tahun Pemkot Yogya, tepatnya pada Kamis (2/6) lalu, publik dikejutkan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah pemeriksaan, KPK akhirnya menetapkan empat tersangka atas dugaan suap perizinan Apartemen Royal Kedhaton. Masing-masing ialah mantan Walikota Yogya Haryadi Suyuti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nurwidhiarta, mantan ajudan eks Walikota Yogya Triyanto Budi Yuwono, serta Vice

President PT Summarecon Agung Oon Nusihono. Danang pun berharap kemarin menjadi peristiwa terakhir serta terbangun kesadaran bersama agar bekerja secara profesional. Peristiwa itu bahkan harus menjadi tamparan keras bagi seluruh aparat.

"Ini yang harus menjadi kesadaran bersama. Selama ini Pemkot sudah cukup baik. Dari penilaian internal dan berbagai insansi eksternal pun sudah cukup baik. Intinya ASN jangan silau dengan gratifikasi. Makanya ini momentum antigratifikasi," tandasnya. Tidak dapat dipungkiri, apapun yang sudah dilakukan oleh Haryadi Suyuti selama 15 tahun memimpin Kota Yogya, selaku pimpinan daerah su-

SEMPAT TERHENTI KARENA PANDEMI COVID -19 Program Moekti Berlanjut di Empat SLB Gunungkidul



Proses terapi seni bagi pelajar SLB di Gunungkidul

KR-Istimewa

DINAS Kebudayaan (Kundha Kabudayan)) DIY melalui Seksi Seni Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni kembali melanjutkan program Mobil Keliling Terapi (Moekti) yang sempat terhenti pada 2020 lalu karena Pandemi Covid-19. Kali ini, program Moekti 2022 mendatangi empat Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Gunungkidul, yakni Kridha Mulya Semanu, Bakti Putra Karangmojo, Sekar Handayani Panggang dan SLB Muhammadiyah Ponjong.

"Pada tahun 2020 itu ada empat SLB yang tertunda dan kami lanjutkan pada tahun ini," kata Kasi Seni Disbud DIY Purwati didampingi Kabid Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dra Y Eni Lestari Rahayu kepada KR, Selasa (31/5).

Dijelaskan Purwati, terapi yang dilakukan bagi peserta dalam bentuk karya seni disesuaikan dengan jenis ketunaannya. Hal tersebut dilakukan mengingat seni merupakan terapi yang bagus untuk anak berkebutuhan khusus.

"Kami juga melibatkan psikolog, observer hingga fasilitator. Jadi ada yang mencatat mulai dari

sebelum hingga setelah terapi. Semua akan dicatat sesuai ketunaan. Kami juga lakukan diskusi dengan orangtuanya terkait terapi ini," sambung Bu Pur.

Diskusi dengan orangtua ini sangat penting karena keterlibatan mereka selama proses terapi begitu dibutuhkan. Terapi seni juga menjadi pilihan karena mudah dan berada di lingkungan rumah.

"Tapi kami juga bawa material untuk terapinya. Setelahnya bisa diteruskan pihak sekolah. Selama ini dampaknya bagus. Mereka mampu mengimplementasikan kemampuan, potensi dan bakat yang dimiliki. Hasil karya mereka juga nantinya rencana akan dipamerkan," ucap Bu Pur.

Dalam kesempatan tersebut Purwati juga menegaskan program ini akan menjangkau SLB di seluruh wilayah DIY. Selain terapi, akan ada workshop guna menentukan metode terbaik untuk diterapkan.

"Termasuk masing-masing sekolah diharapkan ada psikolog guna membantu memberikan penilaian. Hasilnya dapat dilaporkan secara berkala," ucapnya. (Feb)

PENGUMUMAN (Tentang Sertipikat Hilang)						
Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:						
No	Nama/Alamat Pemohon	Hak Atas Tanah Jenis & No Hak	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Desa / Keli. Kecamatan	No. Pengumuman
1	MADHAB NARSIDI Desa Sambong Kec. Panggelan Kab. Banjarnegara	HM : 00248 Luas : 1144 m ²	MADHAB NARSIDI	28 Juni 2013	SAMBONG PUNGSELAN BANJARNEGARA	12/2022

PENGUMUMAN (Tentang Sertipikat Hilang)						
Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:						
No	Nama/Alamat Pemohon	Hak Atas Tanah Jenis & No Hak	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Desa / Keli. Kecamatan	No. Pengumuman
1	ADHI ARTANTA Desa Parakanrangah Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara	HM : 00671 Luas : 177 m ²	ADHI ARTANTA	5 Desember 1990	PARAKANRANGAH BANJARNEGARA BANJARNEGARA	7/2022
2	KHOTINI Desa Nagasari Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara	HM : 00298 Luas : 1.004 m ²	KHOTINI	29 Agustus 2019	NAGASARI PAGENTAN BANJARNEGARA	11/2022